

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan digitalisasi membuat organisasi menata ulang pelaksanaan administrasi, aktivitas operasional, serta proses pengambilan keputusan. Di tengah kompetisi organisasi yang semakin ketat, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, teknologi informasi kini tidak sebatas sarana penunjang, melainkan berubah menjadi kebutuhan strategik. Salah satu perangkat teknologi yang mendukung tata kelola organisasi ialah SIA. Dalam organisasi sektor publik, SIA diperlukan untuk mendukung pencatatan, pemrosesan, penyusunan laporan, serta penyajian informasi keuangan supaya prosesnya berlangsung teratur, cepat, akurat, dan akuntabel. Sistem yang disusun serta dimanfaatkan dengan benar mampu menghasilkan informasi keuangan yang relevan dan tersedia tepat waktu sehingga berguna sebagai dasar penentuan keputusan manajerial serta pencapaian tujuan organisasi (Rizaldi, 2015).

Penggunaan teknologi informasi memiliki keterkaitan kuat dengan hasil kerja aparatur. Sistem ini mampu memengaruhi kualitas kerja pegawai langsung melalui kemudahan penyelesaian pekerjaan dan secara tidak langsung melalui penyesuaian aliran kerja, efisiensi tata kerja, serta perbaikan kualitas informasi organisasi. Bila dimanfaatkan secara benar, sistem informasi mendukung aparatur menyelesaikan pekerjaan lebih cepat, mengurangi kekeliruan administrasi, dan membuat proses kerja lebih jelas. Akan tetapi, ketika sistem belum sesuai dengan kebutuhan pemakai, belum dipahami secara memadai oleh pegawai, atau tidak

didukung kapasitas SDM yang memadai, sistem justru berpotensi memperlambat pelaksanaan tugas. Sebab itu, dampak sistem informasi pada capaian aparatur amat bergantung pada kesesuaian antara sistem, pekerjaan, dan kemampuan pengguna.

Kinerja aparatur dapat dipahami sebagai hasil yang dicapai pegawai saat melaksanakan kewajiban sesuai tanggung jawabnya. Penilaian kinerja tidak semata-mata bertumpu pada banyaknya pekerjaan yang selesai, melainkan turut mempertimbangkan kualitas hasil, ketepatan waktu, kecermatan, serta kepatuhan pada ketentuan organisasi. Mangkunegara (2008:67) mengemukakan bahwa kinerja ialah hasil kerja dalam aspek kualitas dan kuantitas yang dicapai pegawai saat menunaikan tugas berdasarkan tanggung jawab yang diberikan. Berdasarkan pemaknaan itu, capaian aparatur menjadi tolok ukur penting untuk melihat kapasitas pegawai dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

Pada organisasi pemerintahan, capaian aparatur dapat dilihat dari kapasitas individu dalam menyelesaikan tugas berdasarkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, serta kemampuan yang melekat pada dirinya. Pegawai yang kompeten cenderung lebih cepat memahami prosedur, memakai fasilitas organisasi, dan menyelesaikan pekerjaan sesuai aturan. Hasil kerja turut dipengaruhi oleh kesesuaian antara sistem informasi yang dipakai, sifat pekerjaan, keperluan organisasi, dan kemampuan pegawai selaku pemakai. Sistem yang selaras dengan kebutuhan kerja mampu memperbaiki efektivitas, sedangkan sistem yang sulit dipahami mampu memunculkan hambatan operasional. Oleh sebab itu, aspek pekerjaan, kebutuhan pemakai, dan kapasitas individu harus dipertimbangkan dalam penerapan sistem informasi organisasi (Rizaldi, 2015).

SIA mampu meningkatkan produktivitas aparatur sebab mampu menyederhanakan kegiatan yang berkaitan dengan data dan transaksi keuangan. Melalui sistem ini, penghimpunan, pencatatan, klasifikasi, pemrosesan, serta pelaporan data mampu berjalan lebih sistematis. Pegawai tidak harus sepenuhnya bertumpu pada prosedur manual yang memerlukan durasi lebih panjang dan berpeluang menimbulkan kekeliruan. Sistem yang terintegrasi membuat administrasi keuangan mampu dijalankan dengan lebih efisien, efektif, dan terarah. Oleh sebab itu, SIA tidak hanya menjadi alat teknis, melainkan turut bagian dari sistem kerja organisasi yang berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan lembaga. Sebab informasi keuangan menjadi landasan berbagai keputusan, kualitas SIA menentukan kualitas informasi yang dihasilkan (Nainggolan, 2023).

Akan melainkan, keberhasilan pemanfaatan SIA tidak semata-mata dipengaruhi oleh kecanggihan teknologi ataupun kelengkapan fitur. Aspek manusia tetap menjadi faktor kunci supaya sistem mampu memberi manfaat maksimal. Kapasitas SDM menjadi salah satu faktor pokok yang menentukan keberhasilan organisasi dalam memanfaatkan SIA. Pegawai dengan kompetensi yang memadai lebih dapat memahami mekanisme kerja sistem, menjalankan fitur, menginput data dengan akurat, serta memanfaatkan keluaran informasi untuk menunjang pekerjaan. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas pegawai mampu menurunkan efektivitas sistem. Oleh sebab itu, kapasitas SDM memberikan sumbangan penting pada peningkatan capaian aparatur melalui pemanfaatan SIA secara akurat (Syahida et al., 2024).

Kapasitas SDM meliputi pengetahuan, kemampuan teknis, kemampuan adaptasi, serta sikap kerja yang mendukung penyelesaian tugas secara profesional.

Dalam organisasi publik, aparatur tidak hanya harus memahami tugas administratif, melainkan turut harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi serta pola kerja digital. Kemampuan pegawai dalam memahami sistem, beradaptasi pada perubahan, serta memakai teknologi informasi akan menentukan cara tugas diselesaikan. Jika aparatur mampu menjalankan SIA secara baik, alur kerja mampu berjalan lebih cepat, kesalahan mampu dikurangi, dan tujuan organisasi lebih mudah diwujudkan. Di sisi lain, kapasitas yang belum memadai mampu menjadikan sistem tidak dipakai secara optimal.

Kapasitas SDM menjadi unsur pokok yang mendukung peningkatan kinerja aparatur, sebab hal itu menggambarkan kesiapan pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai jabatan masing-masing. Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dikutip oleh Fadhil (2016) menerangkan bahwa kapasitas ialah daya mampu serta karakteristik yang dimiliki pegawai Negeri Sipil, meliputi pengetahuan, keahlian, serta sikap kerja yang diperlukan supaya tugas jabatan mampu dijalankan secara profesional, efektif, dan efisien. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa kapasitas tidak hanya berkaitan dengan kemampuan teknis, melainkan turut meliputi etika kerja, pola sikap, serta kesanggupan dalam melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Sejalan dengan semakin kompleksnya pekerjaan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu, inovasi teknologi, dan tuntutan masyarakat atas layanan publik yang lebih baik, penguatan kompetensi aparatur menjadi kebutuhan yang harus segera dilaksanakan.

Akan tetapi, kondisi empiris di instansi pemerintah daerah memperlihatkan bahwa penerapan SIA belum sepenuhnya mampu mendorong kinerja aparatur

secara optimal. Keadaan tersebut terlihat di BPKD Aceh Utara, di mana pemanfaatan SIA masih menghadapi sejumlah hambatan ketika dijalankan. Kendala yang muncul antara lain keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan, kesalahan ketika menginput data, serta fitur sistem yang belum dipakai secara penuh. Situasi ini menegaskan bahwa efektivitas SIA tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan perangkat teknologi, melainkan turut dipengaruhi oleh kesiapan SDM, kompetensi pemakai, serta keterlibatan pegawai saat menjalankan sistem. DeLone dan McLean (2003) menerangkan bahwa kesuksesan sistem informasi dipengaruhi oleh kualitas sistem, kualitas informasi, intensitas penggunaan, kepuasan pengguna, serta dampaknya pada individu maupun organisasi.

Dalam konteks sektor publik, SIA memiliki fungsi penting sebab berkaitan langsung dengan transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik. Setiap instansi pemerintahan wajib menyusun laporan keuangan yang jelas, relevan, andal, serta mampu diperbandingkan dengan laporan lain Akuntansi Pemerintahan, penyusunan laporan keuangan pemerintah dimaksudkan menyajikan informasi yang bermanfaat bagi proses pengambilan keputusan sekaligus merepresentasikan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepada entitas tersebut (Syabri & Kusmilawaty, 2022). Oleh sebab itu, SIA yang efektif diharapkan mampu menghasilkan data keuangan yang berkualitas, akurat, tersedia cepat, serta mudah dipakai oleh pihak yang membutuhkannya.

Di luar hambatan teknis penggunaan sistem, terdapat pula persoalan yang berhubungan dengan temuan pemeriksaan keuangan daerah. LHP Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara

masih berisi beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti, terutama terkait pengelolaan serta ketepatan data keuangan daerah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah masih belum optimal walaupun sistem informasi sudah dipakai dalam administrasi serta pelaporan. Artinya, keberadaan sistem tidak secara otomatis memastikan kualitas pengelolaan keuangan bila tidak didukung prosedur kerja yang memadai, ketepatan data, dan kapasitas aparatur untuk menjalankan sistem dengan akurat (BPK RI, 2024).

Kondisi tersebut menegaskan bahwa selain sistem, kapasitas SDM ialah unsur penentu kualitas capaian kerja aparatur. Pegawai dengan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai lebih siap menekan kesalahan, memperbaiki ketelitian, serta mempercepat proses penyusunan laporan keuangan. Kemampuan yang baik turut membantu pegawai memahami fungsi sistem secara komprehensif, sehingga sistem tidak hanya menjadi alat pencatatan, melainkan turut media penyedia informasi bagi pengambilan keputusan. Hal ini selaras dengan Mangkunegara (2008:67) yang mengemukakan bahwa kinerja ditentukan pula oleh kemampuan individu ketika melaksanakan tanggung jawabnya. Oleh sebab itu, peningkatan capaian aparatur memerlukan dukungan teknologi informasi dan penguatan kapasitas SDM secara bersamaan.

Penelitian ini memakai landasan sejumlah teori yang relevan untuk menerangkan keterkaitan antara pemanfaatan SIA, kapasitas SDM, dan capaian aparatur. Teori pertama yang dipakai ialah Technology Acceptance Model (TAM) dari Davis (1989). Model tersebut menerangkan bahwa penerimaan pemakai atas sistem informasi ditentukan oleh persepsi atas kemudahan penggunaan serta

manfaat yang dirasakan. Jika pegawai memandang bahwa SIA mudah dipakai dan memberikan manfaat langsung bagi tugas kerja, kemungkinan sistem diterima dan dimanfaatkan secara optimal akan semakin besar. Oleh sebab itu, TAM membantu menerangkan cara aparatur menerima, memakai, serta memperoleh manfaat SIA dalam pelaksanaan tugas.

Di luar TAM, penelitian ini memakai perspektif Resource Based View (RBV). Berdasarkan sudut pandang RBV sebagaimana dijelaskan Madhani (2010), sumber daya organisasi dapat menjadi landasan untuk mencapai kinerja unggul jika bernilai, sukar disalin, dan mampu dimanfaatkan secara efektif. Dalam penelitian ini, kapasitas SDM ditempatkan sebagai aset strategis organisasi. Pegawai yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kapasitas sesuai kebutuhan menjadi unsur penting untuk mengoptimalkan pemanfaatan SIA. Oleh sebab itu, kualitas SDM tidak hanya berfungsi pada aspek teknis, melainkan turut menjadi unsur strategis yang ikut menentukan keberhasilan organisasi mencapai kinerja yang lebih baik.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini memfokuskan pada dua variabel independen, yaitu Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Kedua variabel tersebut dipilih karena merupakan faktor yang paling relevan dengan pelaksanaan tugas pokok pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara. Implementasi Sistem Informasi Akuntansi berperan dalam mendukung proses pengelolaan informasi keuangan agar lebih efektif, akurat, tepat waktu, dan akuntabel, sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia menentukan kemampuan pegawai dalam

memanfaatkan sistem tersebut secara optimal. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan tugas dan peningkatan kinerja pegawai dipengaruhi oleh penerapan sistem informasi akuntansi yang baik serta didukung oleh kompetensi sumber daya manusia yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh Implementasi Sistem Informasi Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kinerja pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah penelitian ini disusun sebagai berikut:

1. Sejauh mana pemanfaatan SIA memberikan pengaruh pada kinerja aparatur di BPKD Aceh Utara?
2. Sejauh mana kapasitas SDM memberikan pengaruh pada kinerja aparatur di BPKD Aceh Utara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sasaran kajian ini disusun sebagai berikut:

1. Untuk menguji dampak pemanfaatan SIA pada kinerja aparatur di BPKD Aceh Utara.
2. Untuk menguji dampak kapasitas SDM pada kinerja aparatur di BPKD Aceh Utara.

1.4 Batasan Masalah Penelitian

Supaya tujuan penelitian mampu dicapai, maka cakupan penelitian harus dibatasi. Batasan penelitian dijelaskan sebagai berikut:

1. Kajian ini terbatas pada pegawai BPKD Aceh Utara
2. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner yang diberikan kepada pegawai instansi pengelola keuangan daerah (BKPD) Kabupaten Aceh Utara, sebab itu, hasil penelitian didasarkan pada persepsi responden.
3. Cakupan waktu penelitian dibatasi pada periode tahun 2026.
4. Penelitian ini tidak membahas faktor lain selain variabel yang telah ditentukan, seperti kepemimpinan, budaya organisasi, maupun faktor eksternal lainnya yang berpotensi memengaruhi kinerja aparatur.

1.5 Kontribusi Penelitian

Kajian ini diharapkan menyediakan kontribusi. Kontribusi kajian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah Daerah instansi pengelola keuangan daerah (BPKD Aceh Utara) menjadi bahan pertimbangan untuk memperbaiki efektivitas pemanfaatan SIA, penguatan kemampuan pegawai, serta pembinaan sikap kerja yang lebih positif.
2. Bagi Pegawai dapat dipakai sebagai dasar evaluasi diri untuk memperbaiki kapasitas, disiplin, motivasi, dan perilaku kerja.
3. Bagi Penulis memberikan pengalaman langsung dalam melaksanakan penelitian dan menambah wawasan akademik dan praktis di bidang akuntansi sektor publik.